



DISHUB

Kabupaten Purwakarta
JL.VETERAN NO.1 CISEUREUH PURWAKARTA

RENCANA KERJA [RENJA] TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Perhubungan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perhubungan tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 31 Juli 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

NIP. 19720228 200312 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	14
2.2. Analilis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penlenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2024	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	45
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3. Program dan Kegiatan	47
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	63
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	63
BAB V Penutup	72
TABEL	
Tabel	
2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan	17
TC.2.9 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2024	17
TC.3.0 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24

TC. 3.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2025	36
2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	40
TC.3.2	Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	52
4.1.	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023. Dokumen Renja Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perhubungan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Sebagai sebuah dokumen resmi Dinas

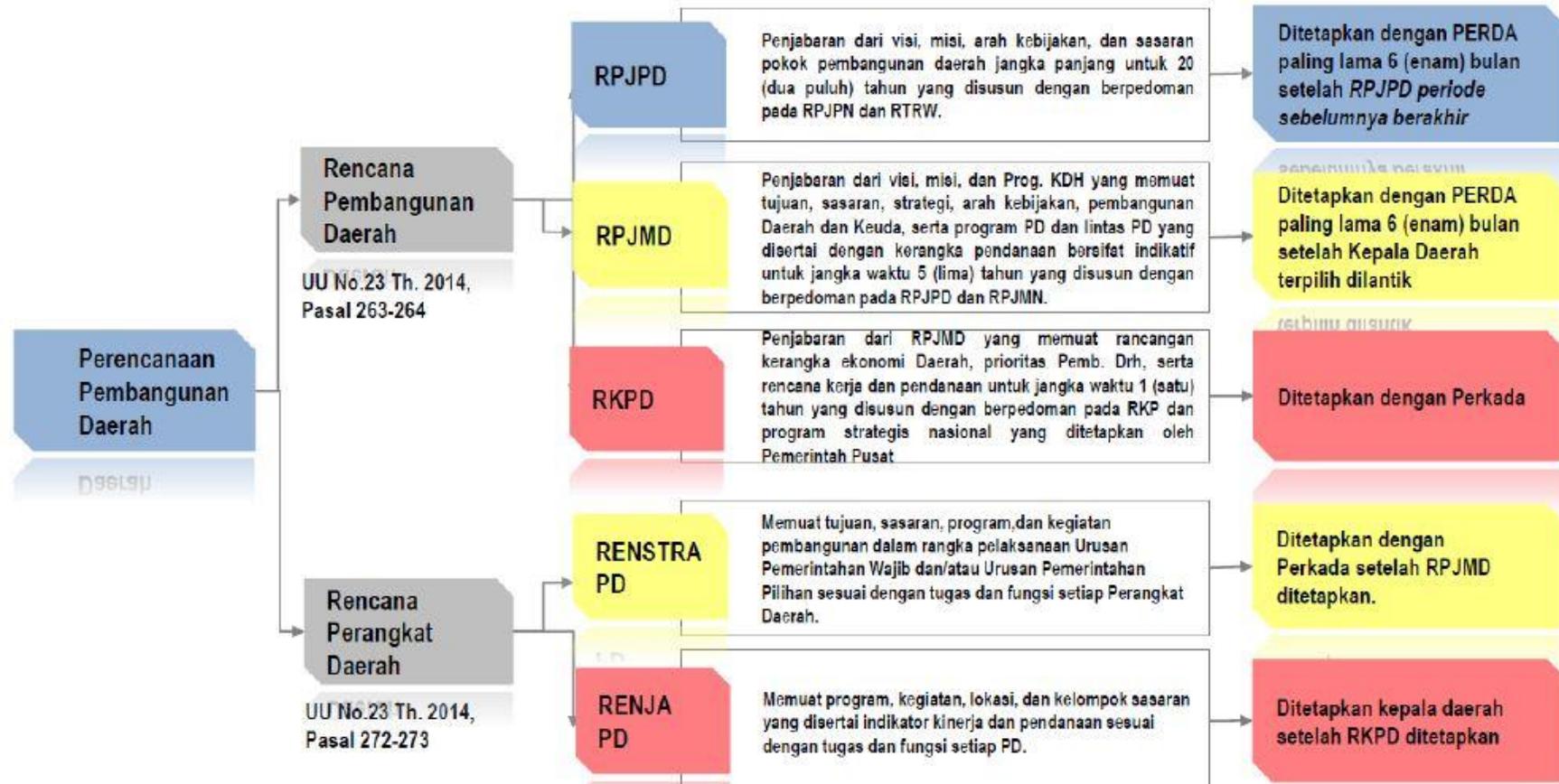
Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang menjadi satu kesatuan untuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja PD pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah dengan merujuk pada RPJMD 2020-2024 dengan tema Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Sasaran pembangunannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dokumen perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat yang dipedomani dalam menyusun Renja OPD dan

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pembangunan Jawa Barat tahun 2024 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2025 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM” Terkait dengan Dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebagai pedoman utama penyusunan Renja OPD, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan OPD harus benar-benar bisa menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, dan Program Unggulan Daerah.

Gambar Bagan Alir Penyusunan Rencana Kerja PD



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I-5 menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I-6 Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I - 7
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I-8;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun 2024-2026
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I – 9;
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
45. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah untuk menyajikan dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang aspiratif dengan skala prioritas untuk mendukung tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
2. Sebagai upaya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penyenggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, meliputi:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024, meliputi :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian Tujuan dan Indikator SDGs,
 - Penurunan angka kemiskinan,
 - Pencapaian NSPK dan SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi penjelasan umum rencana kerja yang mencakup program dan kegiatan perangkat daerah, beserta pagu anggarannya

BAB V Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2024. Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana. Rencana Kerja 2024 Dinas Perhubungan. Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya, dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sampai dengan TW.II tahun berjalan selengkapnya sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2 (selengkapnya terlampir). Dari tabel 2.2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 3 program dan 19 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Secara umum, target kinerja program/kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Dari 60 (enam puluh) sub Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024, dapat terpenuhi capaian target outputnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: Secara umum sudah sesuai dengan target yang direncanakan, namun tingkat penyerapan anggaran sebesar 43,67 %.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Rata-rata capaian target kinerja kegiatan adalah 100%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan: Pemenuhan target kinerja program/kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang baik seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, baik pada tataran kebijakan, teknis, dan pelaksana. Selain itu, koordinasi dan dukungan lintas sektor dan stakeholder terkait juga sangat membantu pencapaian target tersebut.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perhubungan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah . Adapun program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 3 program, 19 kegiatan dan 56 sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
 - g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
 - h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
 - i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Pelayaran
 - a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota.
 - b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Realisasi dari target capaian dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan target kinerja pada Renstra baik dari target fisik maupun target keuangan sudah baik, sebagaimana dalam **Tabel 2.1** (Tabel.T-C.2.9 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) berikut ini:

Tabel T.C. 2.9

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d 2024
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

Kode	Perangkat Daerah/Bidang /Urusan/Program/Kegiatan						Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD Parsial I (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan II			Selisih		Catatan Permasalahan		
								Lokasi	Target	Pagu	Target	Pagu	%	Pagu	%			
1	2						3	4	5	6	7	8	9=(8/6)	10=(6-8)	11=(10/6)	12		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								43.862.873.684		19.157.079.165	43,67	24.705.794.519	56,33			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								35.371.564.884		17.023.145.291	48,13	18.348.419.553	51,87		
2	15	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								73.711.600		12.773.000	17,33	60.938.600	82,67
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	PWK	Dok	21.695.700	-	-	0	-	100			
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PWK	Dok	10.364.800	-	-	0	-	100			
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PWK	Dok	9.603.100	-	-	0	-	100			
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PWK	Dok	9.732.100	-	-	0	-	100			
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PWK	Dok	9.541.900	-	-	0	-	100			
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	PWK	1 Laporan	7.956.000	1 Laporan	7.956.000	100	-	0			
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun	PWK	1 Laporan	4.818.000	1 Laporan	4.817.000	99,98	1.000	0,02			
2	15	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.605.427.201		5.199.895.299	49,03	5.405.531.902	50,97
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN	PWK	98 Org/Bln	10.577.908.301	98 Org/Bln	5.188.410.099	49,05	5.359.498.202	50,95			
2	15	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	PWK	1 Dok	20.249.000	1 Dok	4.215.300	20,82	16.033.700	79,18			

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	pengandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang g-undangan	Pwk	1 Dok	14.400.000	1 Dok	4.560.000	31,67	9.840.000	68,33	
2	15	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	PWK	1 Laporan	24.800.000	1 Laporan	24.200.000	97,58	600.000	2,42	
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan keluar daerah	PWK	1 Laporan	166.838.049	1 Laporan	28.053.180	16,81	138.784.869	83,19	
2	15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah menu/fitur sistem	PWK	1 Dok	240.000.000	-	-	0	240.000.000	100	
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah				1.103.202.093		136.000	0,01	1.103.066.093	99,99	
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	PWK	91 Unit	170.995.409	-	136.000	0,08	170.859.409	99,92	
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	PWK	32 Unit	796.875.684	-	-	0	796.875.684	100	
2	15	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	PWK	23 Unit	135.331.000	-	-	0	135.331.000	100	
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.375.291.101		10.599.596.039	52,02	9.775.695.062	47,98	
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	PWK	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	1.800.000	72	700.000	28	
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PWK	1 Laporan	15.220.802.773	1 Laporan	8.022.504.271	52,71	7.198.298.502	47,29	
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji tenaga harian lepas, PTT, penjaga malam, pembantu penguji dan premi asuransi	PWK	1 Laporan	5.151.988.328	1 Laporan	2.575.291.768	49,99	2.576.696.560	50,01	
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.123.727.800		668.709.623	59,51	455.018.177	40,49	
2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	PWK	5 Unit	99.700.000	5 Unit	19.268.600	19,33	80.431.400	80,67	
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya	PWK	24 Unit	234.500.000	Unit	154.834.900	66,03	79.665.100	33,97	
2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	PWK	120 Unit	135.101.000	Unit	34.080.000	25,23	101.021.000	74,77	
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan	PWK	7 Unit	337.865.150	Unit	256.428.473	76,78	78.436.677	23,22	

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

						Persetujuan Teknis Andalin									
2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			412.500.000		142.478.500	34,54	270.021.500	65,46	
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	PWK	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	40.620.000	54,16	34.380.000	45,84
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota	PWK	1 Laporan	237.500.000	1 Laporan	54.320.000	22,87	183.180.000	77,13
2	15	02	2	08	07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PWK	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	47.538.500	47,54	52.461.500	52,5
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		77.337.000	51,56	72.663.000	48,44	
2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lapoaran Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	PWK	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	77.337.000	51,56	72.663.000	48,44
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			267.745.000		49.728.000	18,57	218.017.000	81,43	
2	15	03	2	13		Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			267.745.000		49.728.000	18,57	218.017.000	81,43	
2	15	03	2	13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	PWK	1 Unit	218.017.000	Unit	-	0	218.017.000	100
2	15	02	2	13	10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	PWK	1 Laporan	49.728.000	1 Laporan	49.728.000	100	-	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama). Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 2.2** (Tabel.T-C.3.0 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) berikut ini:

Tabel T.C. 3.0

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Target			Target Akhir Renstra
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7			8
1.	Hasil Penilaian SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Hasil LHE AKIP	Point	71	71	71	71	100
			Kualitas Laporan Keuangan	Point	92	92	92	92	100
		Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	80	81	81	81	100
2.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia	Meningkatnya Prasarana Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	%	25,82	26,10	26,40	26,70	100
3.	Jumlah Izin Penyelenggaraan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan orang degan Kendaraan Bermotor Umum yang	Meningkatnya Jumlah Izin Penyelenggaraan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan orang degan Kendaraan Bermotor Umum yang diterbitkan	Persentase Izin Penyelenggaraan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan orang degan Kendaraan Bermotor Umum yang diterbitkan	%	8,25	10,25	12,25	14,25	100

	diterbitkan pada tahun tersebut	pada tahun tersebut	pada tahun tersebut						
4.	Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala pada tahun tersebut	Meningkatnya Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala pada tahun tersebut	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji atau Laik Fungsi pada tahun tersebut	%	46,86	47,20	47,60	48	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan isi-isu strategis dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta terkait Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan kendaraan umum berbasis aplikasi;
4. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
5. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan perbatasan;
6. Belum tersedianya Terminal Tipe C;
7. Jaringan Lintas angkutan Barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.

2.3.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 246 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ;
3. Pelaksanaan upaya Bimbingan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berlalu Lintas ;
4. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
5. Penerbitan Rekeomendasi Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir ;
6. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
7. Persetujuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ;
8. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota ;
9. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota ;
10. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dalam Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten ;
14. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota ;
15. Penerbitan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota;
16. Penerbitan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan tertentu yang Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota ; dan
17. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Kabupaten serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Wilayah Pelayannya dalam Daerah Kabupatn/Kota.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Perhubungan Kota Purwakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Kemacetan Lalu Lintas di Kota Purwakarta.
- b. Pencemaran Lingkungan (Polusi Udara) yang diakibatkan oleh Sektor Industri dan Kendaraan Bermotor (Motorized Traffic).
- c. Kecelakaan Lalu Lintas.
- d. Rendahnya Penggunaan Angkutan Umum.
- e. Kurang Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Purwakarta seperti marka, rambu dan RPPJ.
- f. Rendahnya Tingkat Disiplin Pengguna Jalan.
- g. Tidak seimbangnya Pertumbuhan Jumlah Kendaraan dengan Penambahan Jaringan Jalan di Kota Purwakarta.
- h. Kurangnya Lahan Parkir.

2.3.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu “*Purwakarta Cerdas, Sehat Berakhlakul Karimah*” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Purwakarta, yaitu :

Visi dan Misi

Visi merupakan suatu pernyataan komperenhensif tentang segala sesuu yang diharapkan suatu organisasi pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang organisasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah “***Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah***“

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan misi Kabupaten Purwakarta sebagai rumusan umum untuk memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi Kabupaten Purwakarta

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berpendidikan dan Berakhlakul karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efesien, Bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat

Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Misi tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran tersebut memiliki peran pentingn sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembagunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra perangkatat daerah untuk periode 3 tahun. Terdapat 8 (delapan) rumusan tujuan Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 yaitu :

Tujuan :

- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing
- Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

- Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat
- Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah
- Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
- Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai

Sasaran :

Adapun sasaran Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 untuk pencapaian tujuan dirumuskan dalam 17 sasaran yang digambarkan dalam table berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas mutu Pendidikan dan Kebudayaan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
- Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
- Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
- Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
- Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
- Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan

- Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
- Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
- Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Penerapan SPBE
- Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

Strategi

Rumusan strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kepala Daerah diterminologikan menjadi 29 strategis sebagaimana table dibawah ini :

- Strategi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas
- Strategi 2 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan
- Strategi 3 : Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat
- Strategi 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat
- Strategi 5 : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan
- Strategi 6 : Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Kelauraga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera
- Strategi 7 : Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
- Strategi 8 : Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli

- Lingkungan
- Strategi 9 : Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan korban Bencana
- Strategi 10 : Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
- Strategi 11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital
- Strategi 12 : Membangun Iklim Investasi Yang Kondusif
- Strategi 13 : Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri
- Strategi 14 : Mengembangkan Potensi Daya tarik dan Destinasi Pariwisata
- Strategi 15 : Mengembangkan ekonomi Kreatif Masyarakat Yang Berbasis Inovasi
- Strategi 16 : Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan,Pertanian,dan Perikanan
- Strategi 17 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian
- Strategi 18 : Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial Bagi Masyarakat Miskin
- Strategi 19 : Meningkatkan UPaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak
- Strategi 20 : Meningkatkan Kualitas Akses jaringan Jalan dan Jembatan yang Mantap
- Strategi 21 : Meningkatkan Ketersediaan Akses jaringan Air Bersih yang Merta
- Strategi 22 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang handal
- Strategi 23 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
- Strategi 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Strategi 25 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektrrionik
- Strategi 26 : Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)
- Strategi 27 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegrasi
- Strategi 28 : Meningkatkan Pembinaan an partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa
- Strategi 29 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Arah Kebijakan

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
7. Reformasi Birokrasi
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penguatan Kemanan dan ketertiban Masyarakat.

Isu Strategis

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah;
2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan dan sarana/prasarana bidang kesehatan dan KB;
3. Reformasi system ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Penguatan social ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi;

5. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public secara maju dan modern;
6. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja disusun dalam rangka pemutahiran rencana kerja sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun yang bersangkutan. Renja merupakan landasan operasional bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun proses tahapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Pada tahap ini masing-masing bidang yang berada di lingkup Dinas Perhubungan dimintakan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memperhatikan:

 - Capaian sasaran hasil pada Renstra Dinas Perhubungan yang direncanakan pada tahun 2024.
 - Penjabaran kegiatan dan sasaran output guna mencapai sasaran hasil (outcome).
 - Hasil analisis prakiraan maju anggaran untuk mengetahui pagu indikatif bagi setiap program dan kegiatan.
 - Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan dalam rangka mensinkronisasikan capaian sasaran, hasil/keluaran dan pagu indikatif.
- b. Rekapitulasi usulan dari masing-masing bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Setelah masing-masing bidang selesai dalam merencanakan usulan kegiatan tahun 2024, maka usulan itu kemudian direkap sehingga menjadi satu kesatuan usulan konprehensif Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024.
- c. Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023, dimana dalam forum ini bersama-sama dengan stakeholders (pemangku kepentingan)

yang berada di Dinas Perhubungan membahas kegiatan-kegiatan dan usulan kegiatan pada tahun 2024. Tujuan forum ini adalah sebagai sarana komunikasi:

- untuk membahas rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan usulan dari masing-masing bidang.
- untuk mendapatkan satu pemahanan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi input/masukan dalam penyempurnaan rancangan renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta termasuk di dalamnya menentukan skala prioritas kegiatan dan lain-lain.

d. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

Dari hasil kesepakatan dan komitmen pada forum tersebut di atas, maka disusun rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel T.C. 3.1
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan
 Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (RP. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (RP. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. PWK	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100%	34.935.442.796	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. PWK	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100%	34.935.442.796	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	70.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	70.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	10.915.952.239	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	88 pegawai	10.915.952.239	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 dokumen	30.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100%	10.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100%	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	485.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 paket	485.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100%	1.705.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1.705.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. PWK	Proporsi tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	706.990.557	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. PWK	Proporsi tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7 paket	706.990.557	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. PWK	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20.302.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. PWK	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	166 org 13 bulan	20.302.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. PWK	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	710.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. PWK	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 jenis	710.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. PWK		100%	7.195.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. PWK		100%	7.195.000.000	

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	250.000.000	
Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Kab. PWK	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	2.600.000.000	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Kab. PWK	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	18 unit	2.600.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. PWK	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	275.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. PWK	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	28 org	275.000.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	350.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 laporan	350.000.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. PWK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100%	985.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. PWK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 paket	985.000.000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	2.010.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 kegiatan	2.010.000.000	
Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	150.000.000	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 kegiatan	150.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. PWK	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100%	375.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. PWK	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 kegiatan	375.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	75.000.000	Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	75.000.000	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	
Penetapan Rencana Umum	Kab.	Jumlah Dokumen Penetapan	100%	50.000.000	Penetapan Rencana Umum	Kab.	Jumlah Dokumen	100%	50.000.000	

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

	Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PWK	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PWK	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	25.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	25.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. PWK		100%	200.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. PWK		100%	200.000.000	
	Penetapan Rencana nduk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana nduk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	200.000.000	Penetapan Rencana nduk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana nduk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	1 dokumen	200.000.000	
	Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. PWK	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	0	Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. PWK	Jumlah laporan Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1 laporan	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasi berdasarkan kewenangan. Untuk lebih jelasnya usulan tabel usulan program masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

TC.3.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						42.330.442.796	APBD
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						34.935.442.796	APBD
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000	APBD
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.915.952.239	APBD
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10.875.952.239	APBD		
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	10.000.000	APBD		
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	10.000.000	APBD		

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000	APBD	
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%		10.000.000	APBD	
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%		10.000.000	APBD	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%		10.000.000	APBD	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					10.000.000	APBD	
2.15.01.0.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%		10.000.000	APBD	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					485.000.000	APBD	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%		298.000.000	APBD	
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%		10.000.000	APBD	
2.15.01.0.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%		177.000.000	APBD	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.705.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%		25.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%		200.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%		50.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%		1.000.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%		100.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%		15.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%		25.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		170.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%		20.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.11	Dikungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%		100.000.000	APBD	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					706.990.557	APBD	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%		200.000.000	APBD	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%		406.990.557	APBD	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%		100.000.000	APBD	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.302.500.000	APBD	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		2.500.000	APBD	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%		15.000.000.000	APBD	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%		5.300.000.000	APBD	

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				710.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	100.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	300.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	120.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	75.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	75.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	40.000.000	APBD	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.195.000.000	APBD	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				250.000.000	APBD	
2.15.02.2.02.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	APBD	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta		100%	2.600.000.000	APBD	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	100%	200.000.000	APBD	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	2.300.000.000	APBD	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Purwakarta	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%	10.000.000	APBD	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				275.000.000	APBD	
2.15.02.2.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Purwakarta	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	100%	75.000.000	APBD	
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Purwakarta	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	100%	200.000.000	APBD	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				350.000.000	APBD	
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100.000.000	APBD	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	APBD	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kepadatan Bermotor				985.000.000	APBD	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100%	450.000.000	APBD	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	25.000.000	APBD	

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100%	100.000.000	APBD	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	175.000.000	APBD	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	150.000.000	APBD	
2.15.02.0.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	100%	10.000.000	APBD	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100%	75.000.000	APBD	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2.010.000.000	APBD	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	1.760.000.000	APBD	
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	APBD	
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	APBD	
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Purwakarta	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	100%	0	APBD	
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	100%	100.000.000	APBD	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				150.000.000	APBD	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	100.000.000	APBD	
2.15.02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	100%	50.000.000	APBD	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				375.000.000	APBD	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100%	75.000.000	APBD	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaranaan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100%	225.000.000	APBD	
2.15.02.2.08.07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100%	75.000.000	APBD	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000	APBD	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	APBD	

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	APBD	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	APBD	
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0	APBD	
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	APBD	
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	APBD	
2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	0	APBD	
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	APBD	
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	25.000.000	APBD	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				200.000.000	APBD	
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				200.000.000	APBD	
2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	200.000.000	APBD	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				0	APBD	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Purwakarta	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	100%	0	APBD	
2.15.03.2.13.10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	100%	0	APBD	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2024. Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Penjabaran dari Tema Pembangunan tersebut dalam bentuk Prioritas Pembangunan. Pada Dokumen Rancangan RKP Tahun 2024, telah ditetapkan 7 (tujuh) tema, adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Purwakarta, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan perhubungan masuk pada misi ke-IV yaitu, Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wikayah . Secara garis besar, Ilustrasi Perencanaan Dinas Perhubungan dalam penetapan tujuan dan sasaran rencana kerja terkait dengan Visi Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut : Tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah **“Mewujudkan Sistem Pelayanan Transfortasi Lalu Lintas yang Aman, Tertib dan Handal“**

Sedangkan sasaran adalah **“Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan”** dan merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, dan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 3.2
Indikator dan Target Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Hasil LHE AKIP	71	71	71
		Kualitas Laporan Keuangan	92	92	92
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81	81
Mewujudkan Sistem Pelayanan Transportasi Lalu Lintas yang Aman, Tertib dan Handal	Meningkatnya Prasarana Jalan dalam kondisi baik	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	26,10%	26,40%	26,70%
	Meningkatkan Jumlah Izin Penyelenggaraan Kartu Pengawasa (KP) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang diterbitkan pada tahun tersebut	Persentase Izin Penyelenggaraan Kartu Pengawasa (KP) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang diterbitkan pada tahun tersebut	10,25%	12,25%	14,25%
		Persentase Kendaraan	47,20%	47,60%	48%

		Bermotor yang Lulus Uji atau Laik Fungsi pada tahun tersebut			
--	--	--	--	--	--

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh OPD ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai suatu sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Secara teknis, Rumusan Renja tahun ini dijabarkan dalam 3 Program, 23 kegiatan, dan 76 Sub-Kegiatan, dengan memperhatikan :

VISI	:	Purwakarta Cerdas, Sehat Berakhlakul Karimah
MISI KE 4	:	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
TUJUAN KE 6	:	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah
SASARAN KE 12	:	Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
STRATEGI KE 13	:	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
ARAH KEBIJAKAN KE 6	:	Peningkatan Infrastruktur Daerah

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang direncanakan untuk periode Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan Pendukung)

d. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

- Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tabel TC.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Perogram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			100 %	42.330.442.796	APBD		100 %	44.687.500.000
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	34.935.442.796	APBD		100 %	36.902.500.000
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	70.000.000	APBD		100 %	84.000.000
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000

2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.915.952.239	APBD		100 %	11.323.000.000
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Pwk	100 %	10.875.952.239	APBD		100 %	11.275.000.000
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000

		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.000.000	APBD		100 %	36.000.000
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				10.000.000	APBD		100 %	10.000.000
2.15.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	10.000.000
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				485.000.000	APBD		100 %	512.000.000
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pwk	100 %	298.000.000	APBD		100 %	300.000.000
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	12.000.000
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pwk	100 %	177.000.000	APBD		100 %	200.000.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.705.000.000	APBD		100 %	1.735.000.000
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	50.000.000

	Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor							
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	200.000.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	50.000.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Pwk	100 %	1.000.000.000	APBD		100 %	1.000.000.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pwk	100 %	15.000.000	APBD		100 %	20.000.000
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	25.000.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Pwk	100 %	170.000.000	APBD		100 %	170.000.000
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pwk	100 %	20.000.000	APBD		100 %	20.000.000
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah				706.990.557	APBD		100 %	750.000.000
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	200.000.000
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	100 %	406.990.557	APBD		100 %	450.000.000
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Pwk	100 %	0	APBD		100 %	0

	Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya							
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.302.500.000	APBD		100 %	21.602.500.000
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pwk	100 %	2.500.000	APBD		100 %	2.500.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pwk	100 %	15.000.000.000	APBD		100 %	16.000.000.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pwk	100 %	5.300.000.000	APBD		100 %	5.600.000.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				710.000.000	APBD		100 %	850.000.000
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	150.000.000
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pwk	100 %	300.000.000	APBD		100 %	350.000.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	100 %	120.000.000	APBD		100 %	150.000.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000

2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	100 %	40.000.000	APBD		100 %	50.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.195.000.000	APBD		100 %	7.535.000.000
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				250.000.000	APBD		100 %	250.000.000
2.15.02.2.02.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	250.000.000	APBD		100 %	250.000.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.600.000.000	APBD		100 %	2.700.000.000
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	200.000.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	2.300.000.000	APBD		100 %	2.400.000.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				275.000.000	APBD		100 %	275.000.000
2.15.02.2.03.01	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe C	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Terlaksananya Rehabilitasi dan	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	200.000.000

	(Fasilitas Utama Pendukung)	Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)							
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				350.000.000	APBD		100 %	350.000.000
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha secara Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	250.000.000	APBD		100 %	250.000.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				985.000.000	APBD		100 %	985.000.000
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pwk	100 %	450.000.000	APBD		100 %	480.000.000
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	25.000.000
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	130.000.000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pwk	100 %	175.000.000	APBD		100 %	100.000.000

2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pwk	100 %	150.000.000	APBD		100 %	150.000.000
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	-
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	100.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2.010.000.000	APBD		100 %	2.150.000.000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	1.760.000.000	APBD		100 %	1.900.000.000
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pwk	100 %	0	APBD		100 %	0
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000

	Kabupaten/Kota	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				150.000.000	APBD		100 %	150.000.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
2.15.02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	50.000.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				375.000.000	APBD		100 %	400.000.000
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	225.000.000	APBD		100 %	250.000.000
2.15.02.2.08.07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	75.000.000

	Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	0	APBD		100 %	0
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	75.000.000
2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	0	APBD		100 %	0
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan				25.000.000	APBD		100 %	50.000.000

	Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	25.000.000				25.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				200.000.000	APBD		100 %	250.000.000
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				200.000.000	APBD		100 %	250.000.000
2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	250.000.000
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				0	APBD		100 %	0
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Pwk	100 %	0	APBD		100 %	0
2.15.03.2.13.10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terawasanya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pwk	100 %	0	APBD		100 %	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta 2024-2026 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 per Triwulan akan disampaikan dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta T.A 2025

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Target Kinerja		Pagu Indikatif
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Satuan	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												34.935.442.796
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												70.000.000
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.000.000			2	dokumen	10.000.000
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000							1	dokumen	10.000.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 dokumen	10.000.000	1	10.000.000	1	dokumen	10.000.000
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							1 dokumen	10.000.000	1	dokumen	10.000.000
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							1 dokumen	10.000.000	1	dokumen	10.000.000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 dokumen	10.000.000							1	dokumen	10.000.000

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 dokumen	10.000.000					1	dokumen	10.000.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												11.915.952.239
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3 bln	2.600.000.000	4 bln	3.075.952.239	3 bln	2.600.000.000	3 bln	2.600.000.000	13 bln	90 org/bln	10.875.952.239
2.15.01.02.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 dokumen	10.000.000					1	dokumen	10.000.000
2.15.01.02.2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	10.000.000							1	laporan	10.000.000
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000							1	laporan	10.000.000
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	laporan	10.000.000
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												30.000.000
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.500.000	4	dokumen	10.000.000						
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 laporan	10.000.000					1	laporan	10.000.000
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 laporan	10.000.000					1	laporan	10.000.000
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												10.000.000

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	2.500.000	4	laporan	10.000.000						
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												485.000.000
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			paket	298.000.000						paket	298.000.000
2.15.01.2.05.3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							1 dokumen	10.000.000	1	dokumen	10.000.000
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	org	177.000.000								orang	177.000.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												1.705.000.000
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	6.500.000	paket	6.500.000	paket	6.500.000	paket	6.500.000	1	paket	25.000.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			paket	200.000.000					1	paket	200.000.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	paket	12.500.000	paket	12.500.000	paket	12.500.000	paket	12.500.000	1	paket	50.000.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	250.000.000	paket	250.000.000	paket	250.000.000	paket	250.000.000	1	paket	1.000.000.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	paket	25.000.000	paket	25.000.000	paket	25.000.000	paket	25.000.000	1	paket	100.000.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 media	3.750.000	7	dokumen	15.000.000						
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	25.000.000							1	laporan	25.000.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	42.500.000	4	laporan	170.000.000						
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	4	dokumen	20.000.000						
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	2	dokumen	100.000.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah												706.990.557

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.01.2.07.05	Daerah Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	unit	200.000.000								unit	200.000.000
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	406.990.557								unit	406.990.557
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	100.000.000					1	unit	100.000.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												20.302.500.000
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 lbr	2.500.000							250	lembar	2.500.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	3.750.000.000	4	laporan	15.000.000.000						
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1.325.000.000	4	laporan	5.300.000.000						
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												710.000.000
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	25.000.000	unit	25.000.000	unit	25.000.000	unit	25.000.000		unit	100.000.000
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	75.000.000	unit	75.000.000	unit	75.000.000	unit	75.000.000		unit	300.000.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	30.000.000	unit	30.000.000	unit	30.000.000	unit	30.000.000		unit	120.000.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 unit	75.000.000					1	unit	75.000.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	75.000.000					1	unit	75.000.000

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	40.000.000					1	unit	40.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												7.375.000.000
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												250.000.000
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 dokumen	250.000.000					1	dokumen	250.000.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												2.600.000.000
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				200.000.000						unit	200.000.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.300.000.000						unit	2.300.000.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				100.000.000						unit	100.000.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C												275.000.000
2.15.02.2.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe C			1 dokumen	75.000.000					1	dokumen	75.000.000
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					1 unit	200.000.000			1	unit	200.000.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir												350.000.000
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam			1 dokumen	100.000.000					1	dokumen	100.000.000

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

	Perizinan berusaha Terintegrasi Elektronik secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Elektronik											
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			1 laporan	250.000.000					1	laporan	250.000.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												985.000.000
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2 unit	480.000.000			2	unit	480.000.000
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			21 orang	25.000.000					21	orang	25.000.000
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	7.700 unit	130.000.000							7.700	unit	130.000.000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			4.000 dokumen	100.000.000					4.000	dokumen	100.000.000
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1 laporan	150.000.000					1	laporan	150.000.000
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji										laporan	-
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14 unit	100.000.000							14	unit	100.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												2.010.000.000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	375.000.000	1 laporan	375.000.000	1 laporan	375.000.000	1 laporan	375.000.000	4	laporan	1.760.000.000
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan					1 dokumen	75.000.000			1	dokumen	75.000.000

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

	Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1 laporan	50.000.000			1 laporan	50.000.000	1	laporan	75.000.000
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan dan Perlengkapan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya dan Pemasangan dan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										dokumen	-
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	25.000.000	1	laporan	100.000.000						
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota												150.000.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 laporan	25.000.000	1	laporan	100.000.000						
2.15.02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	1 laporan	12.500.000	1	laporan	50.000.000						
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan												375.000.000
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			1 laporan	37.500.000			1 laporan	37.500.000	1	laporan	75.000.000
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	56.250.000	1	laporan	225.000.000						
2.15.02.2.08.07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	18.750.000	1	laporan	75.000.000						

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												75.000.000
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	18.750.000	4	laporan	75.000.000						
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												50.000.000
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	50.000.000					1	dokumen	50.000.000
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										dokumen	-
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												50.000.000
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000							1	dokumen	50.000.000
2.15.02.2.12.01	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota										dokumen	-
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												25.000.000

Renja Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2025

2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000							1	dokumen	25.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN												200.000.000
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau												200.000.000
2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau					1 dokumen	200.000.000			1	dokumen	200.000.000
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau												-
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau										unit	-
2.15.03.2.13.10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan										laporan	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan (Kinerja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dan mencakup usulan dari masing-masing stakeholder yang ada di Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Purwakarta itu sendiri dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Purwakarta, 31 Juli 2024


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM
NIP.19720228-200312 1 003